

SKRIPSI

ANALISIS WACANA PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENGAH



NURHAYATI

E041201007



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN JUDUL

ANALISIS WACANA PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENGAH

NURHAYATI

E041201007



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGAJUAN
ANALISIS WACANA PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENGAH

NURHAYATI

E041201007

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ANALISIS WACANA PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TENGAH**

NURHAYATI

E041201007

Skripsi

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Sarjana S1 Pada tanggal bulan tahun dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

Mengesahkan:

Pembimbing Tugas Akhir


Haryanto, S.IP., M.A.
NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 197812182008122002

iv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Wacana Pemekaran Daerah Kabupaten Luwu Tengah" adalah benar hasil karya saya dengan arahan dari (Pembimbing **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D** sebagai pembimbing Utama dan **Haryanto, S.IP., M.A** sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 25 Maret 2024

NURHAYATI

E041201007



UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksanakan dengan sukses dan skripsi ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi, dan arahan Bapak **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.** dan Bapak **Haryanto, S.IP.,M.A.** sebagai Dosen Pembimbing tugas akhir. Dan Ucapan terima kasih kepada dosen penguji saya Ibu **Umni Suci Fathia Bailussi S.IP., M.IP** dan Ibu **Dian Ekawaty S.IP., M.A** Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Pemerintah walmas dan seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penelitian ini. Serta saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Sekolah Sarjana Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya selama menempuh program sarjana S1 dan para dosen dan staff departemen Ilmu Politik.

Terakhir, terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Bapak Syahrir dan Ibu Nuralam. atas doa dan pengorbanan selama saya menempuh pendidikan. Dan kepada saudara kandung saya yang telah berkontribusi selama saya berkuliah serta Terima kasih juga kepada sahabat seperjuangan menantu idaman atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai.

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi, permohonan maaf karena penulis tidak mampu menyebutkan semuanya satu persatu

Makassar,25 Maret 2024



NURHAYATI

ABSTRAK

Nurhayati E041201007. *Analisis Wacana Pemekaran Daerah Kabupaten Luwu Tengah.* Di bawah bimbingan **Drs. H.A. Yakub, M.Si., Ph.D dan Haryanto., S.IP, M.A**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana pemekaran kabupaten luwu tengah serta respon dari masyarakat walmas terkait adanya pemekaran Kabupaten Luwu Tengah

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan yang mampu menjawab permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis. Adapun pendekatan dan teori yang digunakan ialah Eriyanto dalam tulisan Van Dijk. Sedangkan konsep yang digunakan yakni konsep pemekaran wilayah.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Dalam analisis wacana pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, terungkap bahwa isu ini telah menjadi perdebatan yang kompleks dan panjang sejak beberapa tahun yang lalu. Proses pemekaran Luwu Tengah telah melibatkan berbagai aktor politik, pemerintah daerah dengan beragam kepentingan yang saling bertentangan. Dan Persepsi masyarakat terkait wacana pemekaran Luwu Tengah menggambarkan adanya polarisasi pendapat antara mereka yang mendukung dan menentang pemekaran tersebut.

Kata kunci : Pemekaran Daerah,Luwu Tengah, Analisis Wacana

ABSTRACT

Nurhayati E041201007. “Discourse Analysis of Regional Expansion of Central Luwu Regency”. Under the guidance of **Drs. H.A. Yakub, M.Si., Ph.D and Haryanto., S.IP, M.A**

This study aims to determine the discourse on the expansion of Central Luwu Regency and the perception of the Walmas community regarding the expansion of Central Luwu Regency.

The type of research used is qualitative research. Data collection was carried out through interviews with several informants who were able to answer the problems that were the subject of discussion in this study, and complete them with several written references. The approach and theory used is Eriyanto in Van Dijk's writing. While the concept used is the concept of regional expansion.

The results of this study found that in the analysis of the discourse on the expansion of Central Luwu Regency, it was revealed that this issue has been a complex and long debate since several years ago. The process of Central Luwu expansion has involved various political actors, local governments with diverse conflicting interests. And public perception related to the Central Luwu expansion discourse illustrates the polarization of opinions between those who support and oppose expansion.

Keywords: Regional Expansion, Central Luwu, Discourse Analysis

**DAFTAR
ISI**

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Analisis Wacana.....	16
2.2 Pemekaran Daerah	19
2.3 Penelitian Terdahulu.....	21
2.4 Kerangka Berpikir.....	22
2.5 Skema Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26

3.1 Tipe Penelitian Dan Jenis Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Jenis Dan Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Informan Penelitian.....	27
3.3 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Deskripsi Kabupaten Luwu, otonomi Baru Luwu Tengah Dan Sejarah Wacana Pemekaran Luwu Tengah	28
4.1.1 Deskripsi Kabupaten Luwu	28
4.1.2 Otonomi Baru Luwu Tengah.....	31
4.4.3 Sejarah Wacana Pemekaran Luwu Tengah	34
4.2 Wacana Pemekaran Luwu Tengah	35
4.2.1 Kekuasaan.....	35
4.2.2 Ideologi.....	38
4.2.3 Konteks Sosial	40
4.2.4Tindakan	40
4.2.5 Historis.....	42
4.3 Respon Masyarakat Terkait Wacana Pemekaran Luwu Tengah.....	44
4.2.1 Pro.....	44
4.2.2 Kontra.....	46
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Luwu	29
Gambar 4.2 Peta Calon Otonomi Baru	31

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Kecamatan dan Luas Keseluruhan Kab. Luwu	29
Tabel 4.2	31
Tabel 4.3 Luas wilayah Calon otonomi baru.....	33
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya pemekaran daerah di era reformasi erat kaitannya dengan beberapa faktor utama. *Pertama*, pada arus global meningkatnya arus demokratisasi, upaya mewujudkan *governance*, upaya pemberdayaan *civil society*, dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) memunculkan tuntutan penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan di beberapa Negara. *Kedua*, pada nasional, berakhirnya pemerintahan orde baru yang dinilai cenderung sentralistik menjadi faktor yang mendorong diimplementasikan asas desentralisasi pada daerah untuk mengolah rumah tangga sendiri secara otonom. *Ketiga*, kesadaran politik masyarakat yang relatif memadai memunculkan tuntutan diselenggarakan otonomi daerah (abdul gaffar karim dkk,2011).

Pemekaran daerah di era reformasi berkarakter *bottom-up* yang dimulai dari dinamika masyarakat, elit-elit lokal dan kelompok-kelompok politik. Pembentukan daerah baru cenderung selalu diawali dengan pembentukan panitia yang terdiri dari para pemangku kepentingan. Bahkan dilanjutkan dengan penggalangan massa sebelum berkas atau proposal diusulkan kepada perumus kebijakan dipemerintah pusat melalui Depdagri, DPR atau DPD. Dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Pemekaran wilayah yang kemudian disebut sebagai pembentukan daerah baru merupakan pembagian kewenangan administratif yang disertai dengan pelimpahan pembiayaan, pembagian luas wilayah serta potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya dan jumlah penduduknya.

Daerah otonomi di pulau Sulawesi terpengaruh adanya kebijakan pemekaran daerah. Pada tahun 2000, Provinsi Gorontalo memisahkan diri dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan bermunculan beberapa gerakan otonomi daerah dengan diikuti tuntutan-tuntutan paling kuat datang dari bagian barat-laut maupun timur-laut daerah itu. Pada tahun 1999, Kabupaten Mamuju, Majene dan Polewali-Mamasa menuntut otonomi dari Sulawesi Selatan dengan tujuan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan,gerakan untuk mendirikan provinsi di daerah Luwu-Tana Toraja juga mulai mengajukan tuntutan-tuntutannya (Henkk,2007).

Tuntutan-tuntutan di daerah Luwu dan Tana Toraja juga terpengaruh untuk melaksanakan kebijakan pemekaran daerah. Pada tahun 1999 Kabupaten Luwu

Utara memisahkan diri dari Luwu. Kabupaten Luwu telah menyusut menjadi lebih kecil dengan daerah Palopo sebagai Ibukotanya mencakup wilayah seluas 3.247,77 km² dengan populasi (Tahun 2001) sebesar 403931 jiwa. Luwu Utara dan Masamba sebagai ibukotanya mencakup wilayah seluas 14.447,46 km² dengan populasi 442.267 jiwa. Pada tahun 2002, Palopo mendapatkan status administratif kotamadya. Tak lama setelah penetapan Luwu Utara, dimulailah *lobbying* untuk membentuk Kabupaten Luwu Timur yang terpisah di bagian timur laut Kabupaten lama. Pada tahun 2003 Kabupaten Luwu Timur memisahkan diri dari Luwu Utara. Demikian Tana Toraja yang relatif kecil (3.205 km² dan penduduk 400.000 jiwa) menjadi sasaran tuntutan pemekaran. Panitia Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (PPKTU) mewakili tujuh kecamatan di Tana Toraja bagian utara dan dibentuk pada tahun 2002. Pada bulan September 2002 permintaan pembentukan kabupaten baru didukung oleh Bupati dan Parlemen Tana Toraja. Inisiatif itu tak lama kemudian diikuti dengan *political lobbying* untuk membentuk kabupaten Toraja Barat. Dibawah undang-undang yang telah direvisi pada tahun 2004 hasil dari inisiatif-inisiatif itu masih belum jelas untuk melaksanakan pemekaran daerah.

Daerah induk kabupaten atau kota tidak jarang ditemukan masalah dalam proses pemekaran daerah. Masalah terkait dengan rentang kendali suatu daerah yang dianggap terlalu luas, sehingga untuk mendekatkan pihak pengambil kebijakan (ibu kota induk) dengan masyarakat dipandang perlu menghadirkan suatu institusi dan struktur pemerintahan daerah otonomi baru. Bahkan wacana pemekaran di daerah mengemuka karena masyarakat tidak dapat menjangkau pelayanan secara maksimal dari kota induk sehingga elit dan masyarakat yang berada dalam daerah bersangkutan berupaya untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Salah satu fenomena di Sulawesi Selatan, Indonesia Timur yang terkait dengan permasalahan wacana pemekaran daerah yaitu wilayah kecamatan Walenrang dan Lamasi membentuk kabupaten baru. Wilayah Walenrang dan Lamasi merupakan kecamatan bagian utara Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang terpisah dari Belopa (kota induk) karena dipisahkan daerah otonom Palopo. Wilayah bagian utara Kabupaten Luwu terdiri dari 2 kecamatan sebelum dipisah. Setelah dimekarkan menjadi 6 kecamatan meliputi Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, dan Lamasi Timur.

Pada tahun 2005, aspirasi masyarakat walmas pada pemekaran wilayah Luwu bergulir saat masyarakat mengeluh akan jarak yang harus ditempuh kurang dari 130 km. Selain karena jarak yang ditempuh terlalu jauh untuk ke kota induk (Belopa) masyarakat juga tidak dapat menjangkau pelayanan secara maksimal sehingga elit politik dan masyarakat yang berada dalam daerah bersangkutan berupaya untuk membentuk pemerintahan sendiri. Adanya Pemekaran daerah walenrang & Lamasi menjadi Luwu tengah adalah sebuah keputusan untuk membagi wilayah administratif Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan,

dengan itu dibentuklah Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FOPKALT) oleh tokoh masyarakat Walenrang dan Lamasi yang saat ini diamanahkan oleh Syukur Bijak sebagai pemimpin Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FOPKALT) untuk mengawal percepatan proses pembentukan Kabupaten pada pemerintah Kabupaten Luwu.

Masyarakat walmas (walenrang & lamasi) sangat mengharapkan terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah, dikarenakan masyarakat walmas merasa bahwa pemekaran ini sangat penting untuk dilakukan dengan didorong berbagai alasan baik dari Administrasi, maupun kewilayahan. Akan tetapi hingga saat ini pembentukan Luwu Tengah belum juga terselesaikan sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat luwu khususnya walmas dan berujung aksi besar-besaran hingga menutup jalan trans Makassar-Palopo pada tahun 2013. Namun Setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran itu Rencana pemekaran Luwu tengah saat ini masih tertunda karena adanya moratorium dari pemerintah pusat.

Dalam Pemekaran daerah kabupaten Luwu Tengah pemerintah telah mengupayakan pemenuhan syarat dengan mengeluarkan surat keputusan persetujuan terhadap pemekaran daerah dari Bupati dan DPRD Kabupaten Luwu. Pemberitahuan Persetujuan bupati ini didasarkan pada hasil studi daerah yang dimana pemerintah daerah melakukan studi kelayakan. Dari situlah diterapkan bahwa kawasan walmas yang direncanakan sebagai kabupaten baru sangat layak sebagai daerah otonom baru tetapi hingga saat ini walmas masih belum masuk dalam calon daerah otonomi baru.

Berawal dari permasalahan diatas mengenai beberapa fakta dan realitas, maka peneliti ingin mengkaji lagi lebih lanjut mengenai pemekaran luwu tengah. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Wacana Pemekaran Daerah Kabupaten Luwu Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Wacana Pemekaran Daerah Luwu Tengah?
2. Bagaimana Respon Masyarakat Terkait Wacana Pemekaran Luwu Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan wacana pemekaran daerah kabupaten Luwu Tengah
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terkait adanya wacana pemekaran Luwu Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari dua manfaat utama yaitu:

1. Manfaat Akademik

Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik pada khususnya. Dan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu politik khususnya topik seputar pemekaran daerah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat yang tertarik mengetahui mengenai pemekaran daerah khususnya rencana pemekaran Kabupaten Luwu. Dan Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan memaparkan aspek yang membahas tentang konsep yang sesuai dengan topik, judul, dan fokus penelitian. Dari konsep inilah yang akan menjadi kerangka berpikir dari perumusan pelaksanaan studi, kajian, dan penelitian yang akan dibahas.

2.1 Analisis Wacana

Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Meskipun ada gradasi yang besar dari berbagai definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa/ pemakaian bahasa. Ada beberapa perbedaan pendapat bagaimana bahasa dipandang dalam analisis wacana. Mohammad A.S Hikam dalam salah satu tulisannya telah membahas dengan baik perbedaan paradigma analisis wacana dalam melihat bahasa yang akan diuraikan sebagai berikut. (mohhammad A.S Hikam,1996).

Ada 3 (tiga) pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan *pertama* diwakili oleh kaum *positivisme-empiris*. Oleh penganut aliran ini, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek diluar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala atau distorsi, sejauh ini dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Salah satu ciri dari pemikiran ini adalah pemisahan antara pemikiran dan realitas. Dalam kaitanya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya, sebab yang terpenting adalah apakah pernyataan itu dilontarkan secara benar menurut kaidah sintaksis dan semantik. Oleh karena itu, tata bahasa kebenaran sintaksis adalah bidang utama dari aliran *positivisme-empiris* tentang wacana. Analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana lantas diukur dengan pertimbangan kebenaran atau ketidakbenaran (menurut sintaksis dan semantik) (A.S Hikam,1996).

Pandangan *kedua* disebut sebagai *Konstruktivisme*. Pandangan ini disebut sebagai fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan empirisme atau positivisme yang memisahkan subjek dan objek dalam bahasa. Dalam pandangan *konstruktivisme*, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka yang dipisahkan dari subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini, seperti

dikatakan A.S Hikam, subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Bahasa dipahami dalam paradigma yang diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri dari sang pembicara. Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu.

Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan ini dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri pada posisi pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari pembicara.

Paradigma *ketiga* disebut dengan pandangan kritis. Pandangan ini ingin mengoreksi pandangan *konstruktivisme* yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Seperti ditulis A.S hikam, pandangan *konstruktivisme* yang masih belum menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana, yang pada gilirannya berperan dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu dan perilakunya. Hal inilah yang melahirkan paradigma kritis. Analisis wacana tidak dipusatkan pada kebenaran atau ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti pada analisis *konstruktivisme*. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada didalam masyarakat. Bahasa disini tidak dipahami sebagai medium yang netral yang terletak diluar diri si pembicara. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema- tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa, batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan. Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat, karena memakai perspektif kritis. Dalam analisis wacana paradigma kritis ini disebut juga sebagai analisis wacana kritis. (A.S Hikam,1996).

Analisis wacana kritis atau juga dikenal sebagai *critical discourse analysis/CDA* tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa. Pada akhirnya, analisis wacana kritis memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tapi bahasa yang dianalisis berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik

tradisional. Bahasa dianalisis bukan hanya dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks berarti bahasa yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk praktik kekuasaan.

Konsep kekuasaan disini adalah alat yang dipakai untuk mengontrol sesuatu, dalam hal ini terbentuk wacana yang berhubungan dengan masyarakat. Hal ini berarti suatu wacana bisa merupakan bentuk praktik kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat.

Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana sebagai bentuk praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektika antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi, ini dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui perbedaan yang direpresentasikan dalam posisi sosial.

Menurut Eriyanto (2008 : 7-13) dari tulisan Van Dijk, dkk ada 5 (lima) hal penting dalam analisis wacana kritis :

1. Kekuasaan, Dalam analisis wacana kritis, aspek kekuasaan (*power*) merupakan hal yang tak terpisahkan. Hubungan antara kekuasaan dan wacana adalah sebagai bentuk kontrol. Wacana digunakan seseorang untuk mengendalikan orang atau kelompok lainnya. Kontrol yang dimaksudkan disini tidak hanya berupa pengendalian fisik secara langsung, tetapi juga melibatkan pengendalian secara mental dan psikologis.
2. Ideologi berkaitan dengan keyakinan atau paham-paham, yang biasanya muncul dari kaum minoritas. Ideologi merupakan suatu konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal tersebut karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari suatu praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Teori-teori klasik tentang ideologi mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi. Menurut Van Dijk mengatakan bahwa ideologi dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan atau praktik individu atau anggota suatu kelompok sehingga bertindak dalam situasi yang sama dan menghubungkan masalah serta memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok.
3. Konteks. Konteks dalam hal ini mencakup latar belakang, situasi, peristiwa, dan kondisi tertentu. Cook berpendapat bahwa analisis wacana melibatkan pemeriksaan konteks komunikasi, seperti siapa yang berkomunikasi dengan

siapa, mengapa mereka melakukannya, audiens dalam situasi apa, melalui media apa, dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa konteks yang mempengaruhi produksi wacana meliputi faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, kelas sosial, etnisitas, agama, serta pengaturan sosial yang spesifik seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar, dan faktor-faktor lainnya yang mendukung wacana.

4. Tindakan Atau Aksi. Wacana dipahami sebagai bentuk interaksi, wacana tidak dianggap sebagai sesuatu yang terisolasi dan internal. Orang yang berbicara atau menulis dianggap tidak melakukannya hanya untuk diri mereka sendiri. Ketika seseorang berbicara atau menulis, mereka menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain.
5. Historis dalam melakukan analisis wacana tidak terlepas dari aspek historis. Misalnya melakukan analisis mengenai selebaran terkait kritik terhadap rezim. Untuk memahami teks tersebut maka diperlukan pemahaman historis seperti kapan teks tersebut dibuat, dimana, mengapa dan dalam situasi politik seperti apa pada saat itu.

2.2 Pemekaran Daerah

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata mekar. Menurut KBBI berarti berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan kembang, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, mulai timbul dan berkembang. Klausa pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperluas bahasa (*euphie isme*) yang menyatakan proses “perpisahan” atau pemecahan suatu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari filosofi harmoni, istilah pemekaran dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi (Makagansa, 2008).

Pemekaran daerah pada hakekatnya adalah membentuk satu wilayah menjadi beberapa wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Istilah pemekaran daerah digunakan untuk menjelaskan bahwa satu daerah telah terbentuk menjadi daerah otonom yang mandiri. Dengan demikian, istilah pemekaran daerah tidak dapat dipisahkan dengan istilah otonom daerah, karena pada prinsipnya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Menurut ketentuan perundang- undangan, khususnya Pasal 33 Ayat 1 huruf a dan b Undang- Undang No.23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan

bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Pemekaran wilayah pada dasarnya upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya harus seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok di masa mendatang (Rosramadhana,2018)

Pembentukan dan pemekaran daerah merupakan sebuah format pengaturan politik dalam penataan hubungan pusat dan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penataan ini telah melahirkan suatu komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan bahwa otonom daerah merupakan format pengaturan politik yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam konsep NKRI (Suaib rahmat,2020)

Menurut Kaloh (2007) pemekaran daerah menjadi provinsi, kabupaten, dan kota dapat dilihat dari dua sisi logika ;

Logika Formal (legislasi), memandang bahwa terjadinya pemekaran wilayah disebabkan adanya dukungan formal UU, sekaligus dengan UU ini memberikan peluang kepada setiap daerah untuk berapresiasi dengan kesempatan ini, sehingga yang terjadi adalah banyak daerah berlomba- lomba untuk menjadikan daerahnya otonom.

Logika Realitas, memandang bahwa pembentukan daerah (tidak memandang apakah otonom atau menjadi daerah kawasan khusus) merupakan sesuatu yang benar- benar urgen secara realitas. Bahwa untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang ada di daerah, alternative pilihan terbaiknya hanyalah pembentukan dan atau pemekaran wilayah/daerah.

Logika politik, memandang bahwa adanya pergerakan- pergerakan sosial politik kemasyarakatan ditingkat lokal dengan ide pemekaran daerah, dan pada saat bersamaan membawa dan mengusung *etnisitas daerah* sebagai penguat menuju terjadi pemekaran (Suaib rahmat,2020)

Upaya pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru melahirkan pemikiran yang berbeda, ada yang optimis dan ada yang pesimis. Kalangan yang optimis memandang bahwa dengan pemekaran akan membuka peluang terciptanya lapangan kerja yang luas bagi semua orang, serta memberikan kesempatan untuk menggali potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kalangan yang pesimis memandang bahwa pemekaran hanya akan menciptakan raja- raja kecil didaerah.

Hasil pemekaran hanya akan berkuasa tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, adanya wacana pemekaran daerah biasanya diawali dengan penyebaran isu ketidakadilan, ketidakadilan adanya pembagian wilayah, ketidakadilan karena adanya tokoh- tokoh pemegang kekuasaan dan pembangunan lebih difokuskan pada wilayah tertentu saja, serta di lingkungan birokrasinya pemerintahan banyak didominasi oleh orang- orang dari golongan tertentu.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suhardiman Syamsu, reksa Burhan, Ade Irma Suryani Haliq yang berjudul "*Pemekaran Daerah Luwu Raya Sebagai Isu Kampanye Pemilihan gubernur Sulawesi Selatan*". Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan tentang Pemekaran daerah luwu raya sebagai isu kampanye pemilihan gubernur Sulawesi terdapat dua garis politik menyertai isu pemekaran pada studi kasus Luwu raya. Secara politik, pihak lain melihat pemekaran pada Luwu raya dapat berdampak buruk pada perolehan elektoral. Setelah pemekaran, kantong-kantong suara yang selama ini berlangsung di Tana Luwu akan pecah pasca pemekaran. Hal ini karena, pemekaran akan memunculkan elit dan patron yang baru, sekaligus menggantikan garis politik dan patron elit lama yang selama ini ada di Ibukota Provinsi (Makassar). Kemudian pada sisi lainnya, pemekaran sebagai ruang akan munculnya elit dan putra daerah. Melalui pemekaran, putra daerah mendapat ruang yang lebih besar untuk terlibat pada proses-proses politik yang akan berlangsung. Pemekaran menjadi ruang untuk membangun konsolidasi politik yang lebih solid.

Transisi sentralisasi ke desentralisasi memberikan ruang politik yang lebih besar kepada daerah. Melalui berbagai reformasi perundang-undangan serta perubahan struktur sosial politik yang berlangsung di Indonesia. Pranata terpusat di bawah bayang-bayang sentralisasi tidak lagi menjadi politik yang dominan. Pemerintahan daerah dan elit lokal kini menjadi pemain baru yang memainkan peran yang cukup dominan di tengah praktek desentralisasi. Pemerintah daerah dan elit lokal yang dalam wujud praktis lebih sering tampil sebagai "penantang" desentralisasi itu sendiri. Berbagai kebijakan di daerah yang di banyak kasus justru semakin mengerdilkan desentralisasi.

Wacana pemekaran yang berlangsung di Luwu sebagai salah satu fenomena lokal yang termasuk ke dalam kategori yang semakin alot di bawah bayang-bayang desentralisasi daerah. Meminjam apa yang telah di sebut oleh Hadiz, bahwa desentralisasi justru ikut memperkeruh suasana yang berlangsung di daerah, desentralisasi ikut serta mendistribusikan wajah dominan desentralisasi dalam wujud yang lain (Hadiz, 2004).

Pemekaran yang secara normatif dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan sosial serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, harus kandas. Penyebabnya, desentralisasi membuat konflik antara elit lokal semakin kompleks (Beier & Ferrazzi, 1998; Comola & Mello, 2010; Hadiz, 2004). Terutama untuk konflik yang berlangsung dalam arena elektoral (Ito, 2006, 2011). Senada dengan apa yang dilihat oleh Saiman, bahwa berlangsung konflik di tingkat pemerintahan meskipun dengan konteks yang berbeda (Saiman, 2017). Di Luwu, pemekaran yang rumit terjadi karena apa yang saya sebut sebagai “lambung elektoral” tidak ingin dilepas oleh elit tertentu. Sehingga kendati wacana pemekaran berlangsung cukup lama, sampai menjadi “jualan politik” saat musim elektoral namun pada realisasi Luwu sebagai lambung elektoral tetap dipertahankan sebagai bagian dari Sulawesi Selatan.

2. Penelitian yang dilakukan Indah Sari yang berjudul “*Rencana Pemekaran kabupaten (studi Kasus : Walenrang-lamasi, Kabupaten Luwu)* ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Walenrang-Lamasi sampai saat ini tidak masuk dalam daftar Calon Daerah Otonomi Baru karena adanya keterlambatan dalam penyempurnaan syarat dan lambatnya rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Selatan, serta adanya moratorium dari pemerintah pusat. Adapun upaya yang dilakukan Tim dalam memperjuangkan Luwu Tengah yaitu dengan membentuk Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (Fopkalt), segala persyaratan pemekaran Luwu Tengah berdasarkan PP No. 78 tahun 2007 telah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Luwu.

Selain itu, upaya yang dilakukan adalah melakukan lobi-lobi politik kepada pemerintah pusat. Lobi dilakukan kepada partai-partai politik yang berkuasa di tingkat nasional. Selain itu upaya yang dilakukan dari luar baik dari pemerintah ataupun elite-elite Walenrang-Lamasi juga turut andil dalam percepatan pembentukan DOB. Salah satunya dengan mencoba secara politik mengirim wakil rakyat di DPR-RI yang dapat memperjuangkan masyarakat Walenrang-Lamasi untuk membentuk DOB

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan untuk mempermudah dalam memahami tujuan dan maksud dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang membahas mengenai Analisis Wacana Pemekaran Daerah Kabupaten Luwu Tengah. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan, bahwa analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa/ pemakaian bahasa. Akan tetapi analisis wacana bukan hanya semata-merta mengenai bahasa dalam teks melainkan analisis wacana terlibat dalam bahasa yang memiliki hubungan dengan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat karena memakai pandangan kritis yang disebut dengan analisis wacana kritis. Dalam hal ini

analisis wacana kritis menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan hanya dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks berarti bahasa yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk praktik kekuasaan. Hal ini berarti suatu wacana bisa merupakan bentuk praktik kekuasaan di tengah-tengah masyarakat yang melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat.

Pada penelitian kali ini untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi elemen yang terkait, peneliti ini kemudian menggunakan teori analisis wacana kritis Eriyanto dalam tulisan Van Dijk. Dalam pendekatan yang ditawarkan oleh Eriyanto sehubungan dengan kekuasaan, ideologi, konteks sosial, tindakan dan historisnya.

Pada isu wacana pemekaran wilayah Luwu Tengah ini dikarenakan adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang mengeluh akan jarak yang harus ditempuh untuk melakukan pengadministrasian ke kota induknya (Belopa) dengan perjalanan sejauh 130 kilometer. Usulan pemekaran wilayah Luwu Tengah ini ada sejak tahun 2005, yang kemudian pada tahun 2008 pemerintah Kab.Luwu menyerahkan proposal permohonan pemekaran Kab.Luwu Tengah ke pemerintah provinsi Sulawesi Selatan agar direkomendasikan ke Menteri Dalam Negeri untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru. Akan tetapi hingga saat ini pemekaran wilayah Luwu Tengah belum terealisasikan.

Sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat Luwu khususnya Walmas dan berujung aksi besar-besaran hingga menutup jalan trans Makassar-Palopo pada tahun 2013. Namun Setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran itu Rencana pemekaran Luwu Tengah saat ini masih tertunda karena adanya moratorium dari pemerintah pusat.

Dalam Wacana pemekaran daerah Kabupaten Luwu Tengah tidak lepas adanya pro dan kontra yang terjadi oleh para elit-elit politik dengan tim pengusul pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Adapun tim kontra terhadap proses pemekaran Luwu Tengah. Ibu Hafidah Rauf selaku mantan Anggota DPRD Kabupaten Luwu menganggap bahwa daerah Walmas belum dapat dimekarkan dan harus bergabung ke Kota Palopo karena alasan potensi Walmas tidak sesuai persyaratan terhadap hasil kajian BPS Provinsi. Dia menganggap jika Walmas bergabung ke Kota Palopo, Walmas akan berkembang dan kedepannya dapat dijadikan daerah otonomi baru, serta dapat memenuhi syarat-syarat BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, Pihak pro adalah tokoh-tokoh politik yang tergabung dalam Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FOPKALT) tidak menyetujui usulan pernyataan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Luwu. Mereka tetap memfokuskan Walmas menjadi Kabupaten Luwu Tengah. Alasannya adalah Walmas merupakan daerah yang unik karena terdapat Kota Palopo yang memisahkan Walmas dengan daerah induk dan rendahnya rentang kendali pemerintah, pembangunan dan pelayanan

yang tidak optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimanakah wacana pemekaran daerah kabupaten luwu tengah dan respon masyarakat terkait adanya pemekaran kabupaten Luwu Tengah.

2.5 Skema Berpikir

